

**TESIS**

**“IMPLIKASI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN PEMILU TERHADAP PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN KPU”**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

**SUTRISNO PUJI UTOMO**

**NPM: 19310014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2020**

**TESIS**  
**“IMPLIKASI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN PEMILU TERHADAP PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN KPU”**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



**Oleh:**

**SUTRISNO PUJI UTOMO**

**NPM: 19310014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2020**

**TESIS**  
**“IMPLIKASI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN PEMILU TERHADAP PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN KPU”**

**DIAJUKAN OLEH:**

**SUTRISNO PUJI UTOMO**

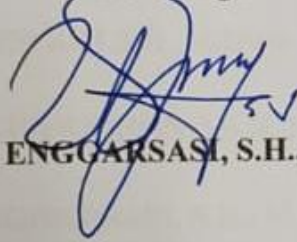
**NPM: 19310014**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal, 08 September 2021**

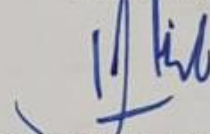
**Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M. Hum.**

**Pembimbing II**

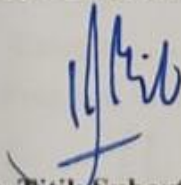


**Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.**

TESIS

**“IMPLIKASI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN  
PELANGGARAN PEMILU TERHADAP PENGAMBILAN  
KEBIJAKAN KPU”**


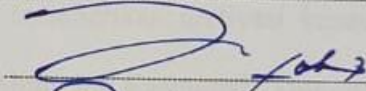

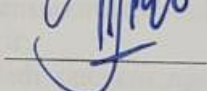
**Dipersiapkan dan disusun oleh:  
SUTRISNO PUJI UTOMO**

**NPM: 19310014**

**Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji**


**Pada Tanggal:**

**Susunan Dewan Penguji**

<b>Nama Penguji</b>		<b>Tanda Tangan</b>
<b>Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H</b>	<b>Anggota</b>	
<b>Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M. Hum.</b>	<b>Anggota</b>	
<b>Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.</b>	<b>Anggota</b>	

**Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal, .....**

**Ketua Program Studi Magister Hukum**

  
**Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianaya, telah memberikan kekuatan, kemurahan, kemampuan dan kreativitas hingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “IMPLIKASI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN KPU” dengan baik. Peneliti mengakui bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan saran dari berbagai pihak yang telah memberikan andil yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu peneliti ingin menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam Kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
4. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum dan Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama Pendidikan.
6. Dr. Umi Enggarsasi,S.H.,M.Hum, yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan study ini
7. Kedua orang tua saya Alm. Bapak Suradji dan Almh. Ibu Kasmidjah, kini cita-citamu untuk punya anak yang berpendidikan tinggi sudah terwujud, semua berkat doamu.
8. Istri saya tercinta, Dewi Intansari yang selalu mensupport saya dalam hal waktu untuk mengingatkan saya tentang pentingnya karir.
9. Anak saya Hafidz Rizky Pratama yang menjadi penyemangat saya untuk mengejar karir saya selama ini.
10. Keluarga Besar yang selalu ada dan telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Akhir kata, harapan peneliti semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Surabaya,

SUTRISNO PUJI UTOMO

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SUTRISNO PUJI UTOMO  
NPM : 19310014  
Alamat : Jl. Cemoro Sewu Gang Cemoro 3 Sukolilo-Tuban  
No. Telpon (Ponsel) : 08995539382

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “IMPLIKASI PUTUSAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN KPU” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarism, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.



Surabaya, Juni 2021  
Yang menyatakan  
*[Signature]*  
METERAI TEMPEL  
405P4AJX216896996  
**SUTRISNO PUJI UTOMO**  
NPM. 19310014

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian .....	11
4. Kajian Teoritis .....	11
5. Metode Penelitian .....	21
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	25
<b>BAB II PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU PADA LEMBAGA BAWASLU TERHADAP KONSEP KEADILAN</b>	
1. Pelanggaran Pemilu.....	28
1.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu .....	28
1.2 Pelanggaran Pidana Pemilu .....	30
1.3 Pelanggaran Kode Etik Pemilu.....	34
1.4 Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya .....	37
1.5 Pelanggaran Sengketa Pemilu .....	38

2. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu .....	39
2.1 Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	40
2.2 Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu .....	49
2.3 Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilu .....	52
2.4 Penyelesaian Pelanggaran Pelanggaran Hukum lainnya .....	54
2.5 Penyelesaian Pelanggaran sengketa pemilu.....	54
3. Penyelesaian Pelanggaran Pemilu terhadap Konsep Keadilan.....	59

**BAB III IMPLIKASI PUTUSAN PELANGGARAN PEMILU PADA  
BAWASLU TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN KPU**

3.1 Kewenangan Bawaslu dalam memutus Pelanggaran Pemilu .....	63
3.2 Faktor yang mempengaruhi putusan bawaslu.....	68
3.3 Implikasi Putusan Bawaslu terhadap pengambilan kebijakan KPU.....	69

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	76
2. Saran .....	78

**DAFTAR BACAAN**



## “ABSTRAK”

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang mempunyai wewenang salah satunya untuk memutus sebuah pelanggaran pemilu. Jika melihat proses penyelesaian dari pelanggaran pemilu bisa juga dikaitkan dengan konsep keadilan, karena pelanggaran pemilu bukanlah kategori tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang penyelesaiannya butuh konsep keadilan agar terwujud demokrasi yang baik. Undang-undang pemilu telah memuat rumusan delik dan ancaman sanksi serta pidananya terhadap pelanggaran pemilu, termasuk mekanismenya dalam menyelesaikannya. Dalam kajian teoritik dapat dipidananya seseorang adalah sangat terkait dengan pertanggung jawaban pidana. Fokus pembahasan pada *legal issue* yaitu bagaimana proses penyelesaian pelanggaran pemilu terhadap konsep keadilan dan Implikasi putusan pelanggaran pemilu pada Bawaslu terhadap pengambilan kebijakan KPU.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. penelitian ini menekankan pada institusi penyelenggara Pemilu, maka pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan jaringan kelembagaan kepada Bawaslu yaitu melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukumnya menggunakan undang-undang terkait dengan pemilu serta turunan di bawahnya yaitu peraturan bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu.

Pengaruh sebuah putusan bawaslu sangat penting dalam memutus pelanggaran pemilu, jika independensi bawaslu tetap melekat dan terjaga marwahnya maka jalannya proses demokrasi di negara ini akan sangat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat yang menghendaki keadilan pemilu terwujud. Dengan pentingnya sebuah putusan bawaslu dalam memutus sebuah pelanggaran maka bawaslu sendiri harus jauh dari sikap ketidaknetralan. Kode etik sebagai penjaga marwah demokrasi harus benar-benar dijaga.

Revisi terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum khusus mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggaran administrative yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu sangat diperlukan. Sanksi yang diberikan seharusnya dapat lebih jelas dan tegas sehingga sanksi yang dijatuhkan tersebut sepadan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan yang pada akhirnya sanksi tersebut dapat berfungsi sebagai pencegahan agar penyelenggara pemilu bekerja sesuai norma/aturan yang berlaku dan efek jera.

Kata kunci :Pemilu, Adil, Kewenangan, Independensi

## “ABSTRACT”

Bawaslu as an election supervisory agency has the authority, one of which is to decide on an election violation. If you look at the process of resolving election violations, it can also be related to the concept of justice, because election violations are not a category of ordinary crimes, but extraordinary crimes whose resolution requires the concept of justice in order to realize a good democracy. The election law has contained the formulation of delix and the threat of sanctions and penalties for election violations, including the mechanism for resolving them. In a theoretical study, the conviction of a person is closely related to criminal responsibility. The focus of the discussion on legal issues is how the process of resolving election violations against the concept of justice and the implications of the decision on election violations by Bawaslu on KPU policy making.

This research is a type of qualitative research. This research emphasizes on election management institutions, so the main approach used is the institutional network approach to Bawaslu, namely through a legal approach and a conceptual approach. Meanwhile, the legal material uses laws related to elections and its derivatives, namely the Bawaslu regulations in dealing with election violations.

The influence of a Bawaslu decision is very important in deciding election violations, if the independence of the Bawaslu is still attached and its dignity is maintained then the democratic process in this country will run very well and fairly for all people who want electoral justice to be realized. With the importance of an Bawaslu decision in deciding a violation, Bawaslu itself must be far from being neutral. The code of ethics as the guardian of the dignity of democracy must be strictly guarded.

Revision of Law 7 of 2017 concerning Special General Elections regarding administrative sanctions against administrative violations committed by election participants and election organizers is urgently needed. The sanctions given should be clearer and firmer so that the sanctions imposed are commensurate with the type of violation committed, which in the end can serve as a deterrent so that the election organizers work according to applicable norms/rules and have a deterrent effect.

Keywords: Election, Fair, Authority, Independence

